

KONSEP ADAB JAWA SEBAGAI KENDALA DALAM INTERAKSI FORMAL BERSEMUKA

Oleh: Susilo Supardo

Abstrak

Tindak bahasa dalam interaksi formal bersemuka yang dilakukan oleh penutur bahasa Jawa dipengaruhi oleh kendali dan kendala tertentu. Interaksi tersebut memiliki kendali yang berupa: (1) bahasa Indonesia baku sebagai kode formal, (2) situasi formal, (3) sikap wajar yang harus ada, (4) sistem hubungan interlokutor, (5) sistem penyelenggaraan interaksi.

Terdapat sejumlah kendala yang mewarnai interaksi ini dalam bentuk kondisi: (1) penutur bahasa Jawa yang juga menguasai bahasa Indonesia adalah penutur bilingual dengan beberapa fasilitas berbahasa, (2) konsep berikut pendukungnya (leksis) di dalam bahasa Jawa tidak selalu terdapat di dalam bahasa Indonesia, (3) karena latar belakang budaya (konsep adab), sikap hubungan menjadi tidak wajar (zakelijik), situasi formal menjadi tidak stabil demikian juga kodenya, (4) bahasa Jawa memiliki penutur yang jelas dengan budayanya. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu tanpa penutur asli dan budaya yang jelas sehingga memiliki ciri seperti bahasa pijin, (5) penutur asli bahasa Jawa yang juga menguasai bahasa Indonesia merupakan pendukung budaya yang jelas, yakni budaya Jawa. Dengan demikian mereka merupakan penutur bilingual koordinatif yang monokultural, (6) karena asumsi beberapa ekspresi dalam bahasa Jawa dianggap lebih tinggi (sopan) dapat terjadi semacam diglosia terbalik secara lokal atau sporadis, (7) implikasi kendala tersebut terlihat dalam tindak bahasa dalam beberapa variasi stilistik.

Dalam realisasi komunikasi formal ini sekali-sekali terlihat beberapa parameter yang memainkan perannya yang cukup dominan sekalipun terdapat norma tindak bahasa tertentu. Hal ini dapat terjadi karena pada hakikatnya di antara komponen tindak bahasa terdapat hubungan yang bermakna. Penutur bahasa adalah produk wilayah sosiokultural tertentu dan budayanya menjadikan modus tindak bahasanya suatu pranata tersendiri.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Pengamatan aspek linguistik yang menyangkut komunikasi verbal dalam kerangka sosial makin meningkat. Hal ini bertumpu pada pendekatan yang lebih menekankan pentingnya fungsi bahasa dalam kehidupan manusia serta kenyataan yang menunjukkan bahwa bahasa tidaklah berdiri sendiri dalam keberadaannya. Selain itu terkait juga hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa memiliki kecenderungan untuk mengadakan kontak dengan sesamanya lewat medium yang berupa bahasa. Kontak itu dapat bersifat komunikatif apabila dilakukan dengan sengaja untuk menampilkan reaksi pendengarnya. Tindak bahasa semacam ini memancing interaksi antara komunikator dan komunikan (Marshaal, 1970: 235). Dalam peristiwa komunikasi yang realisasinya terlihat pada tindak bahasa, kadang-kadang tampak beberapa parameter yang memainkan perannya yang cukup dominan sekalipun terdapat norma tindak bahasa tertentu. Hal serupa ini dapat terjadi karena pada hakikatnya di antara komponen tindak bahasa terdapat hubungannya yang bermakna. Penutur bahasa adalah produk wilayah sosiokultural tertentu dengan keberadaan yang utuh. Kultur pembentuk pribadinya menjadikan modus tindak bahasanya suatu pranata tersendiri. Dengan kondisi demikian penutur tersebut merasa medium komunikasinya sangat fungsional apabila ia dapat mengeksplotasikan tataan yang telah menjadi kebiasaan itu di mana saja. Repertoire yang dikuasainya adalah sarana yang penting yang dapat muncul pada setiap tindak bahasa.

Pada umumnya penutur yang bilingual atau multilingual di dalam proses komunikasi formal cenderung menerapkan kaidah berbahasa yang sesuai dengan situasi tersebut sekalipun sekali-sekali diwarnai oleh pemanfaatan kaidah informal. Salah satu sebab adalah adanya transfer konsep tentang *peradaban* pada penutur dengan latar belakang bahasa dan kultur Jawa di dalam tindak bahasa berbahasa Indonesia. Dalam bahasa Melayu terdapat persepsi tentang istilah *adab*, yang searti dengan kata *sopan santun* atau perilaku yang baik. Bahkan dalam konteks bahasa moderen istilah *adab* dimaksudkan sebagai *peradaban* (*beschaving*) dan *kebudayaan* atau *cultur* (Zoetmulder 1951: 215). Batasan demikian inilah yang dapat dilihat dalam interaksi formal dalam berbagai kesempatan.

Hal seperti dikemukakan di atas merupakan fenomena yang dapat memberikan data inventaris sosiolinguistik. Ada tindak bahasa yang mengikuti kaidah tertentu sebagai kendali, di samping itu terjadi juga

hal-hal yang merupakan penghambat di dalam interaksi formal sebagai kendala.

1.2. Tujuan Tulisan Ini

Tulisan ini sekedar membuat deskripsi berbahasa kelompok di atas yang ditampilkan dalam interaksi verbal secara bersemuka pada situasi formal. Fenomena bahasa seperti ini pada hemat penulis dapat dijadikan sasaran pengamatan sosiolinguistik. Apabila ini dapat dilakukan, mungkin dapat dicatat perilaku berbahasa para anggota kelompok ini dan dapat dilihat latar belakang penampilan bahasanya.

Suatu pretensi yang ada pada tulisan ini adalah membuat catatan kecil tingkah laku berbahasa sekelompok penutur yang diwarnai oleh kaidah (kendali) interaksi formal tetapi juga oleh hambatan (kendala) yang menyusup di dalam interaksi mereka. Berangkat dari pikiran tersebut penulis berharap dapat menampilkan aspek tersebut sekalipun pada taraf awal.

1.3. Lingkup Pembicaraan

Pembicaraan tentang topik ini terbatas pada tindak bahasa yang dilakukan oleh sebagian sivitas akademika IKIP Yogyakarta. Adapun aspek kebahasaan yang menjadi pembahasan adalah interaksi verbal, mengingat hal ini mudah terjadi. Yang dipilih adalah interaksi verbal dalam situasi formal karena interaksi ini dapat memperlihatkan dua bagian depan tulisan ini.

Unsur lingual yang menjadi perhatian adalah tingkat wacana sedangkan apabila satuan seperti 'kata' disinggung selalu dalam kaitannya dengan konstruksi dalam wacana yang fungsional. Pembicaraan unsur bahasa Jawa dititikberatkan pada fungsinya sebagai pendukung analisis ini. Unsur bahasa Jawa ditampilkan berkaitan dengan komponen bahasa dan repertoire yang dikuasai oleh kelompok penutur ini.

1.4. Terminologi

Dalam tulisan ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar penggunaannya sesuai dengan tujuan pembicaraan ini. Istilah 'kendala' mengacu domain dan aspek interaksi formal dimaksud yang merupakan penyebab kehadiran deviasi tingkah laku berbahasa dalam situasi formal. Adapun istilah 'kendali' adalah ketentuan-ketentuan (norma) yang harus berlaku dan merupakan pengarah di dalam tindak bahasa formal.

Selanjutnya frasa 'interaksi formal bersemuka' dimaksudkan sebagai interaksi yang dilaksanakan secara langsung antarinterlokutor yang bersifat verbal dalam situasi formal. Pengertian ini mengacu interaksi di dalam rapat-rapat dan pertemuan resmi. Tentang frasa 'penutur bahasa Jawa' yang dimaksud adalah sekelompok penutur yang menguasai dan biasa menggunakan bahasa Jawa didalam komunikasi mereka, khususnya di dalam komunikasi sehari-hari. Pada umumnya bahasa Jawa merupakan bahasa ibu penutur.

1.5. Subjek Pembicaraan

Pengamatan subjek studi ini menerapkan pendekatan empirik. Penulis mengamati fenomena tindak bahasa ini secara objektif disertai pembahasan deskriptif. Langkah ini sesuai dengan asas kepraktisan dan tujuan tulisan ini seperti tersebut pada pasal 1.2.

Kelompok yang menjadi subjek pembicaraan adalah sivitas akademika IKIP Yogyakarta baik kelompok dosen maupun tenaga administrasi. Karena titik beratnya pada temuan yang menyangkut tindak bahasa formal jumlah subjek itu menjadi kurang penting. Dengan demikian kehadiran tindak bahasa dan kode yang digunakan serta tempat dan situasinya yang diperhatikan.

1.6. Data

Penyusunan tulisan ini ditunjang oleh data primer dihimpun secara langsung dari sumber pertama yakni interlokutor sendiri. Data dimaksud berupa wacana yang muncul dalam interaksi verbal pada forum resmi.

Cara menjaring data dilakukan tanpa rekaman melainkan dengan mencatat unsur lingual yang dikaksud oleh karya ini. Sebagai alasan cara demikian lebih praktis. Selain itu, pengambilan data dilakukan dengan cara terselubung (informan tidak sadar bahwa mereka sedang diamati). Hal ini dilakukan dengan tujuan agar data yang didapat lebih objektif dan autentik. Himpunan data ini tidak dianalisis secara kuantitatif. Oleh sebab itu betapa pun kecilnya jumlah temuan merupakan fakta bahasa yang aktual dan dapat dijadikan bahasan.

2. Bahasa sebagai Institusi dan Fungsi

Menurut Hornby (1952: 653) institusi pada dasarnya adalah sesuatu yang telah dilembagakan oleh hukum, adat- istiadat atau praktek. Apabila bahasa dikatakan sebagai institusi, ia memperlihatkan sifat yang telah

melembaga dan membekas pada penutur bahasa itu sepanjang mereka tidak beranjak dari wilayah pemakaiannya dan kultur sebagai institusi.

Sebagai institusi, bahasa dapat diartikan jaringan antarpribadi yang di

dalamnya orang berbagai pengalaman, mengungkapkan solidaritas, menyusun rencana, bermusyawarah, dan mengambil keputusan di dalam konteks suatu guyuban bahasa (Anton Moeliono, 1982: 8). Di sini akan tampak hal-hal yang berupa santun bahasa, register, ragam bahasa, kode, dan sebagainya.

Bahasa didukung oleh sekelompok orang yang menggunakan sebagai medium komunikasi. Sekelompok orang seperti ini membentuk penutur bahasa itu. Penutur bahasa seperti itu dinamakan masyarakat bahasa (Bloomfield, 1933: 42). Mereka mungkin terdiri atas berbagai pendukung dialek atau sosiolek. Akan tetapi mereka merasa sebagai warga masyarakat bahasa tersebut. Hal ini terjadi karena kesadaran mereka tentang segala norma yang kuat yang ada pada bahasa mereka. Dengan demikian terdapatlah kaitan antara bahasa berikut aspeknya, kaidah dan norma yang berasal dari dunia bahasa dan luar bahasa. Di samping penanda di atas masyarakat bahasa ditandai oleh kehadiran sekelompok manusia yang berinteraksi secara teratur dan sering dengan medium tanda-randa verbal yang disepakati dan dibedakan dari kelompok lain oleh pembeda yang signifikan dalam pemakaian bahasa (Gumperz, 1972: 219).

Menyinggung masalah fungsi dapatlah dikatakan bahwa yang utama adalah menyelenggarakan dan memelihara hubungan sosial atau hubungan dengan orang lain (Trudgill, 1974: 51). Bahasa dikatakan sebagai fungsi karena ia bukanlah suatu organisme. Ia merupakan sesuatu yang memiliki tugas khusus untuk maksud atau tujuan tertentu, seperti disebutkan dalam Webster's (1982: 188). Adapun fungsi pada bahasa adalah seperti tersebut di atas. Dalam kaitan dengan pembicaraan ini patutlah dicatat pendapat Malinowski (1945) yang mengatakan bahwa bahasa menyandang *fungsi phatik*, yakni memelihara hubungan antaranggota masyarakat dan membuka saluran komunikasi sosial. Bahasa pun memiliki fungsi interaksional (Halliday dalam Brown, 1980: 194-195).

3. Bahasa - Penutur - Kebudayaan

Secara spekulatif dapat dinyatakan sangat mustahil setiap pemikiran tanpa kata sebagai komponen bahasa. Kepercayaan, agama, dan berbagai organisasi sosial tergantung pada bahasa, seperti tingkatan sosial, sistem perkawinan, istilah kerabat, hukum, dan sejenisnya. Semua ini merupakan

tradisi yang diwariskan secara turun-menurun dalam kehidupan masyarakat. Tradisi seperti di atas merupakan kebudayaan karena ia adalah warisan sosial (Linton dalam Kroeber, 1948: 252).

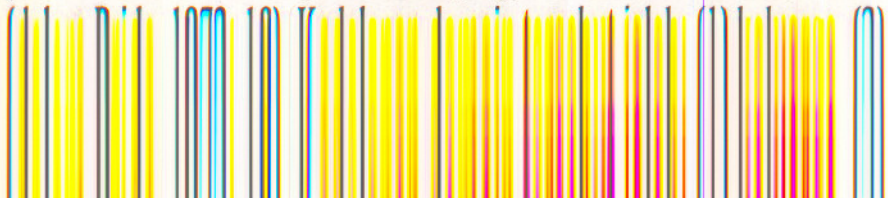
Bahasa adalah sarana kebudayaan dan ekspresi manusiawi. Bahasa sangat dekat dengan struktur dasar manusia. Dengan demikian ia merupakan bagian yang amat khusus dari kebudayaan. Mengikuti pandangan di atas bahasa tidak lain adalah sarana transfer budaya dan aspek budaya. Bahasa bukanlah sekedar masalah semantik, melainkan juga masalah logika, estetika, dan etika. Berpikir yang teratur tercermin dalam ekspresi bahasa. Ekspresi tentang fenomena yang menarik menunjukkan kesanggupan bahasa untuk menerjemahkan imajinasi estetis dengan tepat. Sebaliknya kehadiran kosa kata, istilah, pola, struktur, dan variasi bahasa serta sejenisnya dalam tindak bahasa yang menyangkut perbedaan situasi, relasi antarpembicara, serta topik pembicaraan, merupakan pertanda kehadiran etika dalam masyarakat bahasa. Dengan begitu orang akan tahu mengapa suatu tingkah laku bahasa terjadi dalam masyarakat. Dari pernyataan di atas terlihatlah bahwa terdapat suatu tiga dimensi (trimarta), yakni pertalian antara: *bahasa - penutur - kebudayaan*.

Perkembangan kebudayaan memberikan dampak kepada perkembangan bahasa. Kehadiran kata-kata: *pasca panen*, *rekayasa*, dan sebagainya merupakan bukti. Khusus mengenai perkembangan bahasa ini Pranaka (1979) menekankan adanya modernisasi yang terlibat dalam sederet komponen berbahasa yakni: (1) *discipline*, (2) *accuracy*, dan (3) *precision*. Sebagai konsekuensinya, di dalam berbahasa orang harus menepati kaidah bahasa, baik dalam pemilihan pola struktur maupun kosa katanya. Di samping itu ia harus pula secara akurat dan tepat menyatakan idenya yang sesuai dengan pola struktur bahasa serta *forum*, dan *situasi berkomunikasi*. Ketepatan berbahasa seperti itu tidak hanya menampilkan disiplin, tetapi juga kecendikiaan (intelektualitas). Hal ini menuntut penutur untuk dapat membatasi bahasa dalam situasi yang aktual. Dapatlah dikatakan bahwa dalam rangka menerapkan kaidah komunikasi yang aktual penutur didorong untuk menampilkan kecermatannya.

4. Perangkat Interaksi Formal sebagai Kendali

Mengacu pendapat Pranarka di atas dapatlah dikatakan bahwa situasi menentukan santun bahasa. Sebagai konsekuensinya situasi informal menentukan struktur permukaan bahasanya demikian pula situasi formal. Dengan demikian para interlokutor akan menerapkan kaidah pilihan yang tepat untuk situasi komunikasi tertentu.

Dalam tindak bahasa, interlokutor tidak terlepas dari berbagai domain yang berkenaan dengan tingkah laku berbahasa yang ikut menentukan pilihan bahasa. Ada delapan domain yang disebutkan oleh Schmidt-Ruhr



(dalam Pride, 1972: 18). Kedelapan domain tersebut ialah: (1) keluarga, (2) tempat bermain dan jalan, (3) sekolah, (4) lingkup tempat ibadah, (5) sastra, (6) pers, (7) lingkup militer, (8) lingkup istana dan administrasi pemerintahan.

Yang berada di bawah nomor delapan adalah domain yang relevan dengan pembicaraan ini, yaitu situasi formal. Hal ini juga merupakan *setting* dan *locale* tempat interlokutor menetapkan pilihan kodenya. Adapun kode di sini yang dimaksud adalah sarana komunikasi pada interaksi bersemuka.

Beberapa hal telah menjadi penentu (kendali) cara interaksi serupa ini. Yang dapat dicatat sebagai komponen penentu antara lain adalah:

4.1. Situasi Formal

Situasi yang dihadapi oleh interlokutor atau tempat mereka melakukan interaksi sifatnya formal, terlepas dari kriteria hubungan pribadi. Yang dimaksud adalah hubungan pribadi. Yang dimaksud adalah hubungan antarinterlokutor dipisahkan dari sifat hubungan di luar situasi seperti ini.

4.2. Kode yang Digunakan

Interaksi yang berlangsung dalam situasi formal menggunakan kode atau bahasa baku, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, yakni sebagai bahasa resmi kenegaraan (Halim, 1979: 52). Dalam kaitan ini bahasa Indonesia digunakan juga di dalam komunikasi resmi seperti di dalam perkuliahan, pidato, diskusi ilmiah, rapat, dan sejenisnya. Dengan demikian lexis dan struktur baku dengan variasi yang stabil.

4.3. Sikap Wajar (*Zakelijk*)

Interaksi formal merupakan situasi dengan sistem hubungan yang objektif. Sistem ini memperlihatkan pola hubungan peran dan status interlokutor. Di sini secara tegas dibedakan antara '*power*' dan '*solidarity*'. Teman yang berperan sebagai atasan (*superior*) ditempatkan pada posisinya. Dengan demikian tokoh seperti itu juga akan berubah dan '*solidarity*' dapat diharapkan kehadirannya. Hubungan yang formal seperti disebutkan di atas sifatnya tidak timbal balik (*non-reciprocal*) atau tidak simetris. Sebaliknya apabila interlokutor itu peran dan pownya sejajar

(*symmetrical*) yang terjadi adalah hubungan timbal balik (*reciprocal*) dan di sini terlihat adanya '*solidarity*' (Brown dan Gilman, 1972: 109).

4.4. Sistem Penyelenggaraan

Interaksi formal diselenggarakan dengan sistem. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem perjanjian tentang waktu dan tempat yang ditentukan lebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesulitan atau kerugian pada peserta yang terlibat. Butir ini apabila dilaksanakan dengan tepat merupakan salah satu ciri masyarakat modern, yakni masyarakat yang telah sanggup menempatkan segala persoalan dengan wajar.

Modernisasi ditandai oleh ketepatan waktu di dalam menyelenggarakan sesuatu, tidak kacau di dalam persoalannya, dan teratur di dalam mengorganisasikan urusannya. Selain itu terdapat tanda lain, yakni adanya dunia yang cukup tertib di bawah kendali manusia (Inkelas, tanpa tahun : 92-93). Istilah tertib di bawah kendali manusia mengacu adanya sistem komunikasi sesuai dengan situasinya. Aspek bahasa dan tindak bahasa serta aspek paralinguistik sesuai dengan etiket berbahasa.

5. Kendala di dalam Interaksi Formal Bersemuka

Berangkat dari konsepsi yang menyatakan bahwa bahasa adalah suatu institusi, pembicaraan ini menghubungkan kembali interaksi dengan segenap kaidahnya yang berlaku. Untuk sampai ke sana perlu diingat bahwa seorang penutur sebagai pendukung institusi boleh jadi seorang yang monolingual atau mungkin juga bilingual (multilingual). Jika ia merupakan seorang monolingual, ia memiliki fasilitas berbahasa yang ada pada bahasanya. Sebaliknya apabila seseorang adalah penutur bilingual atau multilingual, ia memiliki beberapa fasilitas yang terdapat di dalam bahasa- bahasa yang dikuasainya. Hal ini terjadi karena setiap bahasa mendukung konsep-konsep seperti itu tidak selamanya terdapat di dalam bahasa yang lain.

Penguasaan bahasa pada hakikatnya adalah penguasaan sarana dan ekspresi kultur. Dengan demikian jika seseorang adalah bilingual, ia cenderung untuk berimplikasi bikultural (Von Moltiz, 1975: 1). Ini terjadi apabila bahasa yang dikuasainya baik L1 maupun L2 didukung oleh kultur tertentu. Sebagai contoh bahasa Jawa didukung oleh kultur Jawa demikian pula bahasa Aceh didukung oleh kultur Aceh. Dengan demikian setiap masyarakat bahasa sifatnya unik. Demikian juga bahasa dan pemakaiannya unik. Oleh sebab itu alihbahasa menjadi sangat sulit atau hampir tidak

mungkin (Malinowski, dalam Dinneen, 1967: 302). Hal seperti ini yang acapkali merupakan hambatan di dalam mengalihbahasakan suatu konsep ke bahasa lain. Sebagai akibatnya seseorang yang bilingual mengalami

kesukaran di dalam mengemukakan konsep tertentu di dalam bahasa lain yang dikuasainya sekaslipun ia merupakan seorang yang menguasai dua bahasa itu dengan sempurna (ambilingual).

Pendapat yang dikemukakan di atas diilhami oleh hadirnya realita tindak bahasa di dalam interaksi formal bersemuka di antara penutur asli bahasa Jawa. Dalam tindak bahasa itu terlihat adanya kendala interaksi yang sifatnya formal. Ciri keformalannya (pasal 4.1 s/d 4.5) menjadi kabur karena yang tinggal adalah '*topik*' dan '*locale*' sedangkan *aspek bahasa*, *situasi*, dan *sikap wajar* tidak dapat bertahan. Dalam kondisi seperti ini interlokutor menggeser dirinya ke situasi informal dengan menerapkan santun bahasa Jawa. Interlokutor berusaha mengalihbahasakan konsep adat Jawa ke dalam situasi berbahasa Indonesia baku sedangkan konsep tersebut tidak selalu tersedia adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian yang terjadi adalah transfer kultur ke dalam bahasa Indonesia.

Sementara itu hal lain yang dapat dibicarakan dalam kaitan dengan ini adalah suatu kenyataan bahwa penutur asli bahasa Jawa merupakan anggota masyarakat bahasa Jawa sebagai L1. Bahasa ini diwarnai oleh *konsep-konsep kulturalnya*. Dalam berinteraksi aspek psikologis seperti hubungan antara atasan dan bawahan (sesepuh), keanggotaan etnis, keharusan menampilkan sopan santun (etiket), dan sejenisnya.

Dalam bahasa Jawa terdapat konsep kultur yang sudah mapan (*settled*) sedangkan pada hemat penulis hal seperti ini belum terlihat di dalam bahasa Indonesia, yang terlihat adalah kultur gabungan (amalgam) yang terbentuk oleh komponen kultur daerah yang masih dalam proses integrasi. Sebagai penjelasan sekurang-kurangnya ciri yang ada pada bahasa Jawa belum tampak.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua tidak memiliki penutur asli. Ia merupakan lingua franca yang diangkat dari salah satu dialek Melayu. Sukar ditentukan dialek Melayu yang mana. Bahasa Indonesia tidak memiliki penutur asli, terbukti tidak satu suku bangsa pun di Indonesia yang mengaku sebagai pemilik atau penutur bahasa ini. Dengan demikian bahasa Indonesia memiliki ciri seperti *pijin*. Jika demikian sudah barang tentu bahasa seperti ini bukan pendukung satu kebudayaan (kultur). Dalam keadaan seperti ini penutur asli bahasa Jawa, yang juga sebagai penutur yang bilingual karena menguasai bahasa Indonesia, tidak *bikultural*. Hal

ini sejalan dengan kondisi bahasa Indonesia yang serupa pignon tadi. Sebagai konsekuensinya penutur bahasa Jawa yang bilangual itu pastilah hanya merupakan pendukung kebudayaan Jawa yang sudah mapan. Di sini yang terjadi adalah penutur seperti ini merupakan penutur bilangual koordinatif yang monokultural (*monocultural coordinated bilingual speaker*).

Atas dasar pemikiran di atas penutur asli bahasa Jawa pada waktu mengalami kesulitan di dalam menyatakan suatu konsep di dalam bahasa Indonesia satuan lingual yang menjadi tumpuannya adalah satuan lingual bahasa Jawa. Interaksi formal bersemuka akan sering diwarnai oleh kehadiran satuan lingual dalam bahasa Jawa yang menjadi pendukung konsep tertentu.

Bahasa Indonesia lebih memiliki kenetralan di dalam masalah penanda konsep. Sebaliknya hanya sedikit tingkat tutur yang dinyatakan dengan satuan lingual (kata). Sebagai contoh di dalam bahasa Indonesia hanya dikenal kata '*mata*'. Sebaliknya pada bahasa Jawa terdapat kata '*matè*', '*mripat*', '*tingal*', '*soca*', dengan makna yang lebih kurang sama tetapi memiliki perbedaan tingkat kesopanan. Bahasa Indonesia lebih memperlihatkan kesederhanaan sedangkan bahasa Jawa menunjukkan kerumitan.

Satuan lingual yang lebih sering muncul adalah kata. Kesulitan dapat terjadi apabila suatu konsep yang berasal dari bahasa Jawa harus dinyatakan di dalam bahasa Indonesia tetapi tidak terdapat korespondensi yang tepat. Oleh sebab itu dalam menerjemahkan kata perlu diingat hal-hal berikut seperti yang disarankan oleh Eppert (1981).

1. Korespondensi satu kata di dalam bahasa tertentu berbanding satu (*one-to-one correspondence*) dengan bahasa lain.

weruh - tahu

ngerti - mengerti

teka - datang

Dalam hal seperti ini tidak akan terjadi kesulitan

2. Korespondensi banyak kata berbanding satu (*many-to-one correspondence*)

nggembol

ngempit - membawanggawa

3. Korespondensi satu kata berbanding banyak (*one-to-many correspondence*)

kikrik - cermat

- sangat berhati-hati
- mudah terganggu (lemah)
- tidak mudah menyesuaikan diri.

4. Satu kata tanpa korespondensi (*one-to-nil correspondence*)

ngawekani

ngoprak-oprak

nomboki

kiyak-kiyuk

Kecenderungan menggunakan konsep yang terdapat di dalam bahasa Jawa pada waktu mengadakan interaksi formal yang didasarkan atas sopan santun, menghadirkan semacam *diglosia terbalik* secara sporadis (lokal) dalam wacana. Untuk menyatakan *eufemisme* atau kesopanan dan pernyataan yang afektif bahasa Jawa dianggap lebih tinggi. Sebaliknya untuk menyatakan hal-hal yang familier bahasa Indonesia yang digunakan dan dipandang tidak bernilai tinggi. Hal ini terlihat dari kehadiran kata atau frasa seperti: 'mangga' 'rawuh', 'matur' 'nuwun sewu', dalam wacana formal, sebagai pengganti kata-kata; silakan, datang, mengatakan, dan maaf.

6. Modus Implikasi Tindak Bahasa

Berkaitan dengan kendala-kendala tersebut di atas terjadilah implikasi dalam tindak bahasa. Implikasi itu terlihat dalam beberapa kemungkinan variasi stilistik yang realisasinya tampak dalam modus seperti berikut ini.

6.1. Alih Kode

Dalam interaksi interlokutor sepenuhnya beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Hal ini dilakukan secara sporadis. Sebagai contoh:

BI : 'Memang susah menelusuri bahan yang sudah lama'

BJ : 'Kulo kinten saged' (RA 1989)

Peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dilatarbelakangi oleh motif; *keakraban* (intimacy). Alih kode seperti ini termasuk alih kode

konotatif yang terjadi apabila interlokutor dengan sengaja melakukannya karena alasan stilistik.

Ada kemungkinan alih kode dapat dilakukan dengan (1) kata-kata tunggal atau istilah disisipkan ke dalam kalimat, seperti: "Siapa pun kecew kalau tidak *diwongke*, apalagi sebagai orang tua' (RA 1989), (2) frasa yang panjang, seperti 'Orang muda senang kalau *dijaluki urun rembug*' (RA 1989), seperti dikatakan oleh Lance (1969).

Apabila alih kode yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan interlokutor menemukan kata yang tepat di dalam bahasa Indonesia, terjadilah alih kode *mekanis*, seperti ternyata pada contoh, 'Dosen kadang-kadang terlambat menyerahkan nilai sehingga perlu *dioprak-oprak* (RA 1989).

6.2. Campur Kode

Dalam hal ini penutur menggabungkan fitur-fitur bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia tanpa menganggap fitur tersebut sebagai unsur yang berlaku di dalam bahasa Indonesia (di sini belum terjadi integrasi satuan lingual). Tindak bahasa ini biasanya didasarkan atas faktor kultur. Sebagai contoh terlibat pada ujaran berikut :

1. Kami sudah pernah *matur*, mereka melihatnya sudah sukar dibina (RKF 1990).
2. *ngGih mangga kemawon*, Bapak bicarakan apa-apa yang perlu *dirembug* (1990).

6.3. Transfer

Pada suatu ketika interlokutor menggunakan fitur yang bermakna secara stilistik dari bahasa Jawa sebagai pendukung komunikasi. Biasanya fitur-fitur semacam itu merupakan alat untuk menyatakan, *salam*, *persetujuan*, *ungkapan terima kasih*, atau sebagai strategi untuk menyatakan kesopanan.

Contoh:

1. Saya kira baik begitu. Dia kan sudah diproses.
Ngono wae, *Pak*. (RA 1989).
2. *Matur nuwun* atas saran Bapak. Itu urusan PTS sendiri
(RKF 1990).

6.4. Pergeseran Horizontal

Oleh karena peserta di dalam komunikasi formal (rapat, dan sebagainya) merupakan teman sejawat, seperti Pembantu Rektor I dan

Pembantu Dekan I, muncullah ujaran yang memberikan kesan kesamaan status sosial. Dengan demikian peran dan status vertikal (PR I sebagai ketua rapat dan pemegang power) dinetralisasikan. Contoh:

1. Saya kira itu penting. *Awake dhewe kudu ngerti*

(RA 1990)

2. Apa mungkin dana sekian masih bisa *diungkret*

Tenah repot (RD 1989).

6.5. Pergeseran Vertikal

Beberapa ekspresi dapat dirasakan sebagai bergeser ke atas dari sikap formal dan wajar di dalam rapat karena secara kebetulan teman sejawat memegang peran sebagai ketua atau penanggung jawab suatu kegiatan. Fitur bahasa Jawa yang digunakan mengarah ke pertanda mengangkat status pemegang peran.

Contoh:

1. BapakKetua kami butuh waktu dua minggu untuk menyusun rencana. *Penjenengan rak mirso* sendiri bagaimana sulitnya kami. (RD 1989).

2. Pak Mitro, *mbok panjenengan maringi ancer-ancer*, cara kerja kita (RD 1989).

7. Penutup

Pembicaraan tentang tindak bahasa dalam interaksi formal bersemuka yang dipengaruhi oleh kendala dan kendala dapat diakhiri dengan menarik beberapa simpulan sementara.

1. Interaksi formal bersemuka memiliki kendala yang berupa: (1) situasi formal, (2) kode bahasa Indonesia baku sebagai kode formal, (3) sikap wajar yang harus ada, (4) sistem hubungan interlokutor, (5) sistem penyelenggaraan interaksi.

2. Terdapat sejumlah kendala yang mewarnai interaksi formal ini dalam bentuk kondisi:

(1) penutur bahasa Jawa yang juga menguasai bahasa Indonesia adalah penutur bilingual (multilingual) dengan beberapa fasilitas

berbahasa, (2) konsep berikut pendukungnya (leksis) di dalam bahasa Jawa tidak selalu terdapat di dalam bahasa Indonesia, (3) karena latar belakang budaya (konsep adat)), sikap hubungan menjadi tidak zakelijk, situasi formal menjadi tidak stabil demikian juga kodenya, (4) bahasa Jawa memiliki penutur yang jelas dengan budayanya. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu tanpa penutur asli dan budaya yang jelas sehingga memiliki ciri seperti bahasa pijin, (5) penutur asli bahasa Jawa yang juga menguasai bahasa Indonesia merupakan pendukung budaya yang jelas, yakni budaya Jawa. Dengan demikian mereka merupakan penutur bilingual koordinatif yang monokultural, (6) karena asumsi beberapa ekspresi dalam bahasa Jawa lebih tinggi (sopan) dapat terjadi semacam diglosia terbalik secara lokal atau sporadis, (7) implikasi kendala tersebut terlihat dalam tindak bahasa dalam benetrapa variasi stilistik.

Daftar Pustaka

- Amran Halim, 1979. *Pembinaan Bahasa Nasional* Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Anton Moeliono, 1982. *Bahasa dan Struktur Sosial. Analisis Kebudayaan, Th. II, No. 3.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bloomfield, L. 1933. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dinneen, F.P. 1967. *An Introduction to General Linguistics*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Guralnik, D.B. (ed). 1982. *Webster's New Worl Compact School and Office Dictionary*. Ohio: Simon & Schuster.
- Hornby, A.S. 1952. *Advanced Dictionary of Current English*. Oxford: The Oxford University Press.
- Kroeber, A.L. 1948. *Anthropology*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Penalosa, F. 1980. *Chicano Sociolinguistics*. Massa chusetts : Newbury House Publishers, Inc.
- Pranarka, A.M.W. 1979. Bahasa Indonesia dalam Hubungannya dengan Pengembangan Kebudayaan Nasional. *Bahasa dan Sastra*. Th. V, No. 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pride, J.B. Stylistic Variation in the Repertoire of Bilingual/Multilingual Speaker, *RELC Journal*, vol. 14, Nr. 1, June 1983, Singapore: The SEAMEO Regional Language Centre.
- Zoetmulder, P.J. 1951. *Cultuur Oost en West*. Amsterdam: C.P.J. Vander Peet.